

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU TANI DI KECAMATAN
BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA**

Mutiara Latifa Ashari, Dra. Dyah Hariani, MM
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id
mutiara.latifa@gmail.com

ABSTRACT

Agricultural development is expected to be able to prosper the community by utilizing modern technology that is effective and sustainable. Agricultural activities are dominated by fertilizer use which aims to increase land production and commodity productivity. The reality that is often encountered by farmers is scarcity of fertilizer. Scarcity of fertilizer results in the difficulty of farmers in increasing land productivity. The government is working with Bank Rakyat Indonesia (BRI) to present a farmer card that aims to overcome various problems related to the availability of subsidized fertilizers while at the same time getting convenience in banking services. The form of the farm card is the BRI co-branding debit card, its use is done by swiping on the BRI EDC (Electronic Data Capture) machine that is placed at the retail stand. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of the program effectiveness research use four indicators, namely the success of the target, the achievement of overall goals, the availability of work facilities and infrastructure, and the system of supervision and control that is educational in nature. In the effectiveness of the farmer card program in Banjarnegara Subdistrict, Banjarnegara Regency there are driving factors and inhibiting factors that affect the program's effectiveness, namely technology, regional regulations, human resources, and the absence of a special budget for farmer cards. Suggestions given includes regular socialization, regeneration related to elderly human resources, procurement of budgets for farmer card programs, and increased coordination between complete retailer kiosks, farmers, and Banjarnegara District Agricultural Extension Center.

Keywords: *Effectiveness of Program, Cards Farmer, Human Resource*

PENDAHULUAN

Pembangunan di suatu Negara memiliki peran yang penting dalam mengubah tatanan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ialah sektor pertanian, Hal tersebut didukung oleh potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah sehingga diharapkan pemerintah mampu mensejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan di bidang pertanian.

Pembangunan pertanian dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern yang tepat guna dan berkelanjutan. Kegiatan pertanian di dominasi oleh penggunaan pupuk yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian. Realitas yang seringkali ditemui oleh petani adalah kelangkaan pupuk, harga yang naik turun, ketika mendistribusikan pupuk untuk masyarakat mengalami masalah. Di dalam mengatasi kelangkaan pupuk yang terjadi, pemerintah menetapkan kebijakan yakni Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berfungsi sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mengawasi alokasi pupuk bersubsidi. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI tahun 2017, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian. Berdasarkan Juklak Penyediaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 terdapat lima jenis pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk masyarakat yaitu urea, sp 36, za, npk, dan organik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), menghadirkan kartu tani sebagai sarana dalam mengoptimalkan kebijakan pupuk bersubsidi bagi masyarakat. Kartu tani menurut Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 521.1/014725 tentang Petunjuk Teknis

Kartu Tani Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia di Provinsi Jawa Tengah, merupakan kartu debit BRI *co-branding* yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di mesin EDC (*Electronic Data Capture*) BRI yang ditempatkan di pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya. Penggunaan kartu tani terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI). Sistem tersebut berisikan data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang terdiri dari nama petani, luas lahan, jenis tanaman, dan alokasi pupuk yang dibutuhkan petani

Tujuan dari program Kartu tani bagi masyarakat adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dengan berlandaskan pada enam asas yaitu Tepat jenis, Tepat jumlah, Tepat mutu, Tepat lokasi, Tepat waktu, Tepat harga. Petani yang menggunakan kartu tani mendapatkan pupuk bersubsidi

sesuai kebutuhan diseluruh agen atau kios yang telah ditentukan, dimana kegiatan pertanian dapat berjalan aman tanpa terganggu oleh tidak tersedianya pupuk bersubsidi. Kartu tani juga berfungsi sebagai tabungan yang dapat digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan tingkat peringkat penggunaan kartu tani di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2018 menunjukkan peringkat penggunaan kartu tani di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kabupaten/ Kota tahun 2018. Kabupaten dengan tingkat penggunaan tertinggi adalah Kabupaten Temanggung dengan alokasi lima jenis pupuk sebanyak 49.162 ton, realisasi 26.403 ton, persentase 54,82 % dan transaksi berjumlah 178.451. Kabupaten dengan tingkat penggunaan terendah adalah Kabupaten Brebes yakni alokasi pupuk sebanyak 79.864 ton, realisasi 191 ton, presentase 0,24% dan jumlah transaksi 4.802 kali. Kabupaten Banjarnegara sendiri menduduki peringkat 32, artinya penggunaan kartu tani masih sangat

rendah yakni dengan alokasi 43.579 ton, realisasi 295 ton, presentase 0,68% dan transaksi sebanyak 3.745. Berdasarkan data yang diperoleh dari KJF Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan penerima kartu tani di Kabupaten Banjarnegara adalah 93.496 jiwa yang terbagi ke dalam 20 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penerima kartu tani terbanyak adalah Kecamatan Wanayasa dengan jumlah 6907 jiwa yang berasal dari 84 kelompok tani dan alokasi pupuk sebesar 4.453.517,74 ton, sedangkan kecamatan dengan jumlah terkecil adalah Kecamatan Banjarnegara yakni 1689 jiwa yang berasal dari 49 kelompok tani dan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 2.046.145,25 ton. Dengan demikian, Kecamatan Banjarnegara merupakan wilayah dengan jumlah pengguna kartu tani terkecil dalam satu kabupaten. Program kartu tani banyak bersinggungan dengan keberadaan kelompok tani yang menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 Tahun 2007 merupakan kumpulan petani/ peternak/ pekebun

yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Pelaksanaan kartu tani yang dilakukan di Kecamatan Banjarnegara masih mengalami permasalahan yakni tidak berfungsinya kartu tani dikarenakan keengganan masyarakat untuk menabung di bank BRI sehingga saldo yang ada di tabungan masih nol. Program kartu tani yang dilaksanakan di Kecamatan Banjarnegara diharapkan tepat sasaran dalam mewujudkan pendistribusian pupuk bersubsidi dan pemanfaatan layanan perbankan bagi para petani. Dengan demikian dapat dilakukan penelitian mengenai efektivitas program kartu tani di Kecamatan Banjarnegara untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara tujuan dan hasil dari program yang telah dilaksanakan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program Kartu Tani di Kecamatan

Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara?

2. Apa faktor penghambat efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara
2. Untuk mengetahui penghambat efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.

Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Prajudi Atmosudirjo (dalam Inu Syafie Kencana, 2006: 24) mengemukakan bahwa Administrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Menurut Marshall E. Dimock, Glayds O. Dimock dan Louis W. Koenig, (dalam Inu Syafie Kencana, 2006: 25) Administrasi Publik adalah

kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari administrasi publik adalah suatu studi yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah dalam menjalankan kegiatan politiknya dimana negara sebagai sebuah organisasi demi mencapai tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Di dalamnya terdapat orang-orang yang diorganisasikan dan digerakkan demi tercapainya proses pencapaian tujuan untuk masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan pelaksanaan kebijakan.

2. Paradigma Administrasi Publik

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya terus berupaya untuk memperbaiki tatanan yang ada untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga dengan adanya prinsip *good governace* atau tata pemerintah yang baik maka menjadi pola yang menghasilkan tindakan dan interaksi antara negara, masyarakat dan swasta (pihak ketiga). Prinsip dari *good governance* menurut Sedarmayanti dalam buku Konsep Dasar Kebijakan

Publik oleh Suwitri (2009: 16-17) yang meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*) Setiap warga negara memiliki hak suara yang sama dan setara dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.
2. Aturan Hukum (*Rule of Law*) Hukum dan perundang-undangan yang ada sangat dibutuhkan untuk mencapai keadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh.
3. Transparansi (*Transparency*) Keterbukaan pada masyarakat harus dibangun dalam rangka kebebasan akses dan aliran informasi.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*) Melayani publik dalam prosesnya diarahkan pada upaya melayani pihak yang membutuhkan *stakeholders*.
5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*) Peran pemerintah sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang menyangkut publik bertujuan untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.
6. Berkeadilan (*Equity*) Keadilan dapat diperoleh pada setiap rakyat Indonesia dengan pemerintah yang berupaya memberi kesempatan yang baik untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*) Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan mengambil manfaat dari pelayanan yang diberikan.
8. Akuntabilitas (*Accountability*) Pemerintah sebagai pihak yang menyelenggarakan pemerintahannya diharuskan memiliki pertanggungjawaban kepada publik.
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*) Visi merupakan sesuatu yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan, para pimpinan dan masyarakat memiliki rencana strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan

yang ada dan diselaraskan dengan pembangunan manusia. Pemerintah sebagai pihak penguasa memiliki peran dan kontrol yang besar dalam membawa masyarakat pada visi negara yang ada.

10. Saling Keterbukaan (*Interrelated*) Keterbukaan antar pihak yang terlibat dalam *good governance* sangat dibutuhkan karena antar pihak tersebut akan membutuhkan satu sama lain atau tidak bisa berdiri sendiri dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan negara.

3. Manajemen Publik

Pasolong (2007: 83) mengemukakan bahwa manajemen publik adalah Suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning, organizing, dan controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain. OTT, Hyde, dan Shafritz (dalam Pasolong, 2007: 83) mengungkapkan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi

publik yang saling berhubungan dan tumpang tindih dimana Manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai dengan perintah kebijakan publik.

4. Efektivitas

Definisi efektivitas menurut Miller (dalam Tangkilisan, 2005: 138) adalah: "*Effectiveness be define as the degree to which a social system achieves its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments.* Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.)

5. Efektivitas Program

Di dalam kaitannya dengan efektivitas, maka efektivitas program merupakan tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan. Senada dengan hal

tersebut Campbell (dalam Mutiarin Dyah dan Zainudin Arif, 2014: 97) efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan dan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat dikatakan sebagai tingkat kemampuan lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya atau dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Keberhasilan sasaran

Keberhasilan sasaran merupakan sejauhmana tujuan dari program kartu tani sudah tepat sasaran berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui keberhasilan sasaran Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, peneliti akan melihat latar belakang dan sasaran dalam program kartu tani yakni petani yang merupakan pemilik maupun penggarap lahan

2. Pencapaian tujuan menyeluruh

Pencapaian tujuan yang menyeluruh merupakan tujuan

program yang dilaksanakan dapat terwujud dan menyeluruh ke semua lapisan yang ada di masyarakat, terutama bagi petani sebagai penerima kartu tani. Untuk mengetahui pencapaian tujuan menyeluruh dari Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, peneliti melihat tujuan dari adanya Program Kartu Tani yaitu mewujudkan distribusi pupuk agar tepat sasaran dengan memanfaatkan layanan perbankan bagi petani serta dampak yang ditimbulkan setelah pelaksanaan program terutama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Program Kartu Tani

2. Tersedianya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana kerja merupakan media yang digunakan dalam melaksanakan program. Untuk mengetahui tercapainya sarana dan prasarana kerja Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara peneliti melihat ketersediaan sarana dan

prasarana serta pemanfaatan yang dalam pelaksanaan program.

3. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
Pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik dalam program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan program. Untuk mengetahui pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik peneliti melihat bentuk pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat serta solusi apa yang dilakukan jika terdapat kendala dalam pelaksanaan Program Kartu Tani.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983) (dalam Mutiarin Dyah dan Zaenudin Arif, 2014:98-99) menyebutkan faktor yang

mempengaruhi efektifitas dan dari suatu program yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan, yakni menurut Fadil Ali, et al (2011) dapat berasal dari budaya, kondisi ekonomi, kondisi sosial, hukum dan dari kondisi alam (geografis).
2. Sumber daya merupakan sumber daya yang digunakan dalam mendapatkan kebermanfaatan dari pelaksanaan program
3. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana; yakni sumber daya yang terlibat dalam proses pelaksanaan program menjadi penentu tercapainya tujuan program. Para pelaksana program ini harus memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang yang sesuai dengan program.:

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian dekriptif kualitatif dengan situs penelitian di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banjarnegara Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kata-kata, dokumen, dan gambar. Di dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yakni dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara

1. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan Sasaran dilihat berdasarkan latar belakang dan sasaran program. Latar belakang program kartu tani berasal dari berbagai permasalahan terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran juga menjadi latar belakang atau dasar penerapan kartu tani untuk masyarakat. Program kartu tani dibuat atas dasar berbagai permasalahan yang menyangkut kesejahteraan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi Dengan demikian adanya kartu tani dapat mengontrol

pendistribusian pupuk bersubsidi pada masyarakat khususnya para petani. Sasaran merupakan penjabaran tujuan yang lebih spesifik dari adanya tujuan program. Di dalam variabel ini diukur melalui sasaran pada petani yakni yang menggunakan kartu tani, dimana sasarannya adalah petani baik yang menggarap maupun yang memiliki lahan sepenuhnya. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah penerima kartu tani di Kecamatan Banjarnegara.

Tabel 3.1

Daftar Desa/ Kelurahan Penerima Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara

No	Kecamatan	Jumlah Penerima
1	Ampelsari	110
2	Argasoka	131
3	Cendana	357
4	Karantengah	309
5	Krandegan	4
6	Kutabanjarnegara	11
7	Parakancanggih	59
8	Semampir	122
9	Semarang	29
10	Sokanandi	89
11	Sokayasa	213
12	Tlagawera	186
13	Wangon	102
	Jumlah	1722

Terkait dengan keberhasilan sasaran dapat diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petani jika ingin memiliki kartu tani yakni harus tergabung menjadi anggota kelompok tani, kemudian mengumpulkan berkas-berkas administrasi seperti *fotocopy* ktp, kartu keluarga, dan sppt atau surat pajak tanah. Kemudian jika lahan tanah yang ingin digunakan untuk kartu tani merupakan milik pemerintah misalnya perhutani maupun PLTA maka harus memiliki surat keterangan lewat kepala kelurahan atau kepala desa.

2. Pencapaian Tujuan

Menyeluruh

Tujuan dari program kartu tani bagi masyarakat adalah sebagai sarana akses layanan perbankan terintegrasi untuk mewujudkan pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Di dalam mencapai tujuan program kartu tani secara menyeluruh terdapat tahap-tahap pelaksanaan program kartu tani yang dilaksanakan di Kecamatan Banjarnegara yaitu sebagai berikut:

a. Sosialisasi Program Kartu Tani

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan gambaran umum program beserta tata cara program. Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi diharapkan dapat tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat mampu menerima dan melaksanakan program yang ditentukan sebelumnya. Sosialisasi program kartu tani di Kecamatan Banjarnegara dilakukan di semua wilayah di Kecamatan Banjarnegara. Pihak yang berperan dalam menyampaikan informasi adalah pegawai BPP yang merupakan penyuluh tingkat kecamatan. Sosialisasi tersebut dilakukan pada tahun 2017 dan bertempat di Balai Desa atau Kantor Kelurahan masing-masing yang tersebar di Kecamatan Banjarnegara.

b. Pendataan dan Verifikasi Data

Pendataan dan verifikasi data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang nantinya akan dimasukkan pada sistem SIMPI (Sistem Manajemen Pangan Indonesia). Data yang diperoleh ketika proses pendataan bersumber

dari RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang telah disusun oleh masing-masing kelompok tani. Penyuluh BPP melakukan pendataan secara lapangan sehingga memperoleh luas lahan, komoditas, jenis pupuk, serta data pribadi masing-masing petani berdasarkan data RDKK yang telah disusun oleh kelompok tani sebelumnya. Keberadaan penyuluh di setiap wilayah binaan berperan penting dalam proses pendataan karena setiap penyuluh akan melakukan pertemuan yang telah dijadwal sebelumnya dan akan mendata per kelompok sebelum nantinya dimasukkan atau di *entry* pada sistem oleh admin. Proses pendataan selain mendata nama pemilik atau petani, juga mewajibkan anggota kelompok tani untuk mengumpulkan berkas persyaratan seperti *fotocopy* ktp, kartu keluarga, dan sppt.

c. Pendistribusian Kartu Tani

Tahap pendistribusian atau pembagian kartu tani dilakukan di desa/ kelurahan di Kecamatan Banjarnegara. Pembagian kartu tani dilakukan oleh Bank BRI sebagai

pihak yang menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam pembuatan kartu debit dan tabungan simpedes. BPP Kecamatan Banjarnegara lebih berperan sebagai pihak yang membantu atau mendampingi terselenggaranya kegiatan pembagian kartu tani di karenakan petani memang lebih dekat penyuluh. Jika petani yang bersangkutan tidak datang maka akan dilakukan pembagian jilid kedua atau termin kedua di kemudian hari.

d. Penggunaan Kartu Tani

Kartu tani yang telah dibagikan sebelumnya pada petani dapat dimanfaatkan dalam kegiatan transaksi pembelian pupuk, selain itu juga berfungsi sebagai alat untuk transaksi kebutuhan sehari-hari. Pembelian pupuk bersubsidi dengan kartu tani dapat dilakukan pada kios-kios yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah dengan menunjukkan kartu tani yang dimiliki kemudian penjual akan menggesek di mesin EDC, jika terdapat kecocokan dalam data alokasi pupuk dengan mesin EDC maka terjadilah transaksi jual beli pupuk.

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan kios resmi di Kecamatan Banjarnegara

Tabel 3.2
KPL (Kios Pengecer Lengkap)
Kecamatan Banjarnegara

No	Nama Kios	Alamat Kios	Wilayah Kerja
1.	UD Kemuning	Kel. Krandegan	Semarang, Ampelsari
2.	UD Tani Makmur	Kel. Semampir	Semampir, Wangon, Karangtengah
3.	UD Tani Sejahtera	Desa Cendana	Cendana, Sokayasa
4.	UD Langgeng Tani	Kel. Krandegan	Krandegan, Argasoka, Tlagawera, Kutabanjarnegara

Berdasarkan tabel di atas terdapat empat kios resmi yang ditujukan untuk petani yang ingin membeli pupuk. Proses penggunaan kartu tani dilakukan dengan terlebih dahulu mengisi saldo atau tabungan di bank, kemudian mendatangi kios yang ada. Pemilik kios akan mengecek kebutuhan pupuk yang diterima oleh petani ketika menggesekkan kartu tani pada mesin EDC.

3. Tersedianya sarana dan prasarana

Pengguna dari kartu tani adalah petani sebagai yang memiliki

kartu tani dan kios pupuk resmi sebagai pihak yang menjual pupuk bersubsidi, sehingga kedua pihak tersebut melakukan kegiatan transaksi jual beli. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petani dan penjual kios adalah kartu tani, tabungan, mesin EDC (*Electure Data Capture*), dan pupuk. Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam menunjang program kartu tani. Di dalam hal ini pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana yang baik bagi pihak-pihak yang melaksanakan program. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya kartu tani itu sendiri, tabungan BRI, alat EDC dan pupuk bersubsidi yang tersedia di kios pengecer, dan pupuk. Untuk admin sebagai pihak yang melakukan pendataan dibutuhkan form rdkk yang terdiri dari nama petani dan luas lahan.

4. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang bersifat Mendidik

Di dalam kaitannya dengan program kartu tani, terdapat banyak *stakeholders* yang mengawasi sehingga tidak hanya pihak

pemerintah saja namun pelaku yang bersinggungan langsung dengan pupuk bersubsidi. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banjarnegara adalah dengan mengadakan pertemuan kelompok tani secara rutin pada masing-masing wilayah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pengawasan secara berkala juga dilakukan dengan membuat suatu grup online yaitu grup *whats app* tingkat kabupaten agar dapat memberikan masukan maupun memberikan laporan permasalahan terkait dengan kartu tani. Pihak Balai Penyuluhan Pertanian juga mendatangi kios pengecer lengkap untuk menanyakan stok pupuk maupun keberlangsungan program kartu tani. Proses pengawasan kartu tani tidak dapat diawasi secara berkala, hanya saja dilakukan pemantauan melalui pertemuan kelompok petani dengan BPP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Di dalam proses pengawasan juga dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk membantu mencari alternatif jalan keluar jika terdapat masalah.

Partipasi masyarakat dalam proses pengawasan ditunjukkan oleh masukan atau laporan dari ketua kelompok tani yang tersebar di wilayah Kecamatan Banjarnegara.

Faktor Penghambat Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara

1. Kondisi lingkungan

Di dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan mempengaruhi berjalannya suatu program itu sendiri. Program kartu tani dapat menimbulkan gesekan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya jika pembagian kartu tani tidak merata ke semua petani yang seharusnya menerima kartu tani.

2. Sumber Daya

Pentingnya suatu anggaran mempengaruhi terwujudnya tujuan program. Tidak adanya anggaran khusus untuk Kartu Tani. Anggaran dalam proses pelaksanaan program merupakan kebutuhan yang penting. Selama proses penerapan kartu tani tidak ada biaya atau anggaran khusus yang diberikan oleh pemerintah

kepada BPP sebagai pihak yang sangat berkaitan dengan petani dan kartu tani. Hal tersebut mengakibatkan hambatan dalam proses pencapaian tujuan kartu tani. Pihak BPP menyatakan bahwa hanya diberikan uang perjalanan ketika melakukan pendataan dan pembuatan RDKK.

3. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Para pelaksana program ini harus memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang yang sesuai dengan program. Diketahui bahwa pengumpulan syarat-syarat seperti *fotocopy* ktp, kartu keluarga, dan sppt tersebut mengalami keterlambatan pengumpulan dikarenakan anggota kelompok tani tidak segera mengumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Umur anggota kelompok tani atau tingkat pendidikan anggota kelompok tani. Tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota kelompok tani akan mempengaruhi mudahnya memahami program yang akan dilaksanakan. Sebagian besar anggota kelompok tani adalah

masyarakat dengan usia tidak produktif yakni rentang usia diatas 50 tahun sehingga sulit untuk mengubah dan mengikuti program yang menggunakan teknologi terutama penggunaan alat transaksi yang memanfaatkan teknologi modern, kemudian rasa sungkan masyarakat untuk menabung di Bank BRI sehingga kartu tani yang dimiliki tidak berfungsi, sehingga para petani lebih memilih untuk menggunakan uang cash sebagai metode pembayaran daripada kartu tani. Kendala lainnya adalah pada saat transaksi jika petani tetap membawa kartu tani namun saldo tabungannya masih nol maka akan ada tambahan biaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara belum memenuhi harapan. Berikut merupakan efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara yang dapat

dilihat dari empat fenomenayaitu sebagai berikut:

Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara

1. Keberhasilan sasaran

Keberhasilan sasaran dalam program kartu tani telah memenuhi harapan. Hal tersebut ditunjukkan dengan target utama program yakni petani yang memiliki luas lahan seluas dua hektar maupun penggarap. Di dalam fenomena ini diukur melalui sasaran pada petani yakni yang menggunakan kartu tani, dimana sasarannya adalah petani baik yang menggarap maupun yang memiliki lahan sepenuhnya. Terkait dengan keberhasilan sasaran dapat diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petani jika ingin memiliki kartu tani yakni harus tergabung menjadi anggota kelompok tani, kemudian mengumpulkan berkas-berkas administrasi seperti *fotocopy* ktp, kartu keluarga, dan sppt atau surat pajak tanah. Jika lahan tanah yang ingin digunakan untuk kartu tani merupakan milik pemerintah misalnya perhutani maupun PLTA

maka harus memiliki surat keterangan lewat kepala kelurahan atau kepala desa.

2. Pencapaian tujuan yang menyeluruh

Pencapaian tujuan yang menyeluruh dalam program kartu tani dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan dampak. Tujuan dari program kartu tani adalah sebagai sarana akses perbankan dalam mendapatkan kemudahan pupuk bersubsidi bagi petani. Dampak positif yang dirasakan oleh petani adalah mereka dapat memanfaatkan kartu tani untuk layanan perbankan, bagi pemerintah memudahkan dalam mendapatkan data pertanian yang lebih akurat serta bagi penjual pupuk adalah memudahkan pelayanan karena telah sesuai dengan kuota yang ada. Dampak negatif yang dirasakan adalah kebiasaan petani yang sebelumnya berhutang untuk mendapatkan pupuk di penjual pupuk kini dengan adanya kartu tani kesulitan berhutang. Pencapaian tujuan program kartu tani dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat.

3. Tersedianya Sarana dan Prasarana

Tersedianya Sarana dan prasarana program kartu tani telah disediakan dengan baik hal tersebut dikarenakan petani telah menerima kartu tani dan tabungan simpedes dari Bank BRI melalui proses pendistribusian di Balai Desa atau Kantor Kelurahan masing-masing, kemudian kios pengecer sebagai pihak yang menyediakan tempat transaksi juga telah dipilih oleh pemerintah dengan tersedianya mesin EDC dan pupuk bersubsidi.

4. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik yang telah dilakukan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banjarnegara adalah dengan mengadakan pertemuan kelompok tani secara rutin pada masing-masing wilayah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pengawasan secara berkala juga dilakukan dengan membuat suatu grup online yaitu grup *whats app* tingkat kabupaten agar dapat memberikan masukan

maupun memberikan laporan permasalahan terkait dengan kartu tani. Pihak Balai Penyuluhan Pertanian juga mendatangi kios pengecer lengkap untuk menanyakan stok pupuk maupun keberlangsungan program kartu tani.

Faktor Penghambat Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara

1. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan mempengaruhi berjalannya suatu program itu sendiri. Program kartu tani dapat menimbulkan gesekan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya jika pembagian kartu tani tidak merata ke semua petani yang seharusnya menerima kartu tani.

2. Sumber Daya

Sumber daya yakni anggaran program kartu tani, dapat diketahui bahwa tidak adanya anggaran khusus untuk Kartu Tani menjadi faktor penghambat terwujudnya program kartu tani. Selama proses penerapan kartu tani tidak ada biaya atau anggaran khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada BPP sebagai

pihak yang sangat berkaitan dengan petani dan kartu tani.

3. Karakteristik dan

Kemampuan Agen Pelaksana

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana Hal tersebut diakibatkan oleh petani yang memilih tidak menggunakan kartu tani dengan alasan sungkan atau enggan untuk menabung di bank sehingga kartu tani yang dimiliki tidak berfungsi, kemudian banyak sekali anggota kelompok tani yang sudah berumur. Sebagian besar anggota kelompok tani adalah masyarakat dengan usia tidak produktif yakni rentang usia diatas 50 tahun sehingga sulit untuk mengubah dan mengikuti program yang menggunakan teknologi terutama penggunaan alat transaksi yang memanfaatkan teknologi. Keterlambatan pengumpulan persyaratan juga terjadi dikarenakan anggota kelompok tani tidak segera mengumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut menghambat terlaksananya program.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan empat fenomena serta munculnya faktor penghambat dari efektivitas program kartu tani. Saran yang dapat diberikan terkait dengan efektivitas program kartu tani adalah Perlu dilakukannya pelatihan mengenai cara penggunaan kartu tani setiap pertemuan kelompok tani yang dilaksanakan pada 35 hari sekali sesuai dengan wilayah binaan penyuluh dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banjarnegara, sehingga pengguna kartu tani mengerti cara penggunaan kartu tani secara benar. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat agar mendapatkan manfaat penggunaan kartu tani bagi kebutuhan petani. Perlu dilakukannya regenerasi terkait dengan sumber daya dalam kelompok tani yang telah lanjut usia. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan tercapainya tujuan program terutama ketika memberikan pemahaman terkait program kartu tani. Perlu adanya anggaran khusus untuk meningkatkan fasilitas program.

Pemerintah diharapkan dapat membuat anggaran khusus untuk program kartu tani agar tidak

menyulitkan pelaksana program dalam memanfaatkan fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia

Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta

Ghony, M. Djunaidi, Almanshur, Fauzan. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media

Kementerian Pertanian. 2017. *Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian RI

Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama

Moloeng. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya

Mutiarin, Dyah, Arif, Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta

Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

P Siagian, Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo

Jurnal:

Arib Hilmy Raihan, Dr. Muh. Jamal Amin, M.Si, Melati Dama, S.Sos., M.Si. 2017. *Efektivitas Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) Di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara*. E-journal Ilmu Pemerintahan Volume 5 (3):

1205-1218 ISSN 2477-2458
Universitas Mulawarman

- Fathoni, Muhammad Rosyidin. 2014. *Efektivitas Implementasi Program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta
- Marlina Nina, Nurasa Heru, Pancasilawan Ramadhan. 2017. *Efektivitas Program Pengembangan Destinasi Pariwisata DiKabupaten Ciamis (Studi Pada Objek Wisata Situ Lengkong)*. Jurnal Administrasi Negara Vol 2 No 1 ISSN 2086-1338 Universitas Padjadjaran
- Noto, Mashari Joyo. 2017. *Efektivitas Implementasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) Di Desa Soko, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan (2012-2015)*. Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 5 Nomor 2 ISSN 2303-341X Universitas Airlangga
- Rafidah Ismail, Norfaridatul Akmaliah Othman. 2014. *The Effectiveness Of Government-Support Programmes Toward Business Growth*. International Journal Of Social Science and Management Vol 3 Issue 3 ISSN 2091-2986 University Of Dhaka Bangladesh
- Reza Khodaei Mahmoodi, Sadegheh Hosseinzadeh Nojedeh. 2016. *Investigating the Effectiveness of E-government Establishment in Government Organizations*. ScienceDirect. Procedia - Social and Behavioral Sciences 230 Pages 136 – 141 Azad University
- Rizcah, Amelia .2015. *Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan*. Tesis Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin Makassar
- Sea-Hong Oha , Hee Young Limb , Byoungsoo Kimc. 2016. *Strategy to Promote the Effectiveness of Technology Transfer of National R&D Programs in Korea: Seen through the G7 Leading Technology Development Program*. Volume 91, Pages 221-229 Korea Institute of Public Administration

Peraturan:

UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian No. 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2017

Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang *Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*

Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 004/2015, Nomor B.122-DIR/KPM/03/2015, Tanggal 4 Maret 2015, tentang *Kartu Tani sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Jawa Tengah*

Perjanjian Kerjasama antara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Semarang dan Kantor Wilayah Yogyakarta, Nomor 049/2015, Nomor B.137 KW-

VIII/PRG/05/2015, Nomor B.2002 KW-VII/PRG/05/2015, Tanggal 8 Mei 2015, tentang *Kartu Tani sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Jawa Tengah*

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 521.1 / 014723, Tanggal 21 September 2015, tentang *Petunjuk Teknis Kartu Tani melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia di Provinsi Jawa Tengah*